

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU DAN UPAYA
HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN KARENA ADANYA
TYING AGREEMENT PADA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR
10/KPPU-1/2016**



Diajukan oleh :

SAMUEL PERMANA GINTING

NPM	: 160512625
PROGRAM STUDI	: HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: Hukum Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU DAN UPAYA
HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN KARENA ADANYA
TYING AGREEMENT PADA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR
10/KPPU-1/2016**



Diajukan oleh :

SAMUEL PERMANA GINTING

NPM	: 160512625
PROGRAM STUDI	: HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: Hukum Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaaran

Tanggal, 24 Januari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be "St. Mahendra Soni", is written over a light-colored rectangular background.

(Dr. St. Mahendra Soni, S.H., M.Hum.)

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU DAN UPAYA
HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN KARENA ADANYA
TYING AGREEMENT PADA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR
10/KPPU-1/2016**



**Skripsi Ini Telah Dipertaruhkan Dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Yang Diselenggarakan Pada:

Hari : RABU

Tanggal : 10 FEBRUARI 2021

Tempat : Melalui Fasilitas MS. TEAMS

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



(Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Tying Agreement* Pada Putusan KPPU Perkara Nomor 10/Kppu-1/2016 Dan Upaya Terhadap Pihak Yang Dirugikan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasinya dengan kerjasama dan memperoleh bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. St. Mahendra Soni, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktu dan bimbingan kepada penulis untuk membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Bapak R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
5. Kedua orang tua saya
6. Kakak- kakak saya yang selalu mendukung dan memberi semangat
7. Keluarga besar ginting

8. Para sahabat-sahabat saya.
9. Teman kontrakan yang selalu menghibur dalam susah maupun senang.
10. Semua sahabat saya di Fakultas Hukum UAJY.
11. Semua anggota perkumpulan yang pernah bekerja sama dengan saya, seperti BPM, JPS, PERMABA, yang telah membantu saya untuk berkembang.

Akhir kata, dengan rendah hati saya mengharapkan saran untuk melengkapi skripsi saya yang jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 27 Desember 2020

Penulis,



(Samuel Permana Ginting)

ABSTRACT

This research describes and examines several problems, first regarding how legal remedies for parties who are aggrieved by the existence of a binding agreement and whether the legal considerations decided by KPPU on case Number 10 / KPPU-1/2016 have provided a sense of justice to the parties. This research is a type of normative law, which is a scientific research system that determines the truth based on the scientific logic of law from the normative side. Scientific logic in normative legal research is built on the basis of scientific disciplines and methods of normative law, namely the science of law whose object is law itself. In this normative legal investigation, positive legal norms are examined in the form of statutory regulations, which are related to the title raised. This legal research focuses on library research, primary legal materials in the form of regulations and secondary legal materials in the form of books, journals, the internet. The results of the research show that legal remedies that can be achieved due to a binding agreement, the injured party can make a report as regulated in the Procedure for Submitting Reports / Complaints in accordance with the provisions of Law Number 5 of 1999 and the Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number. 1 of 2019 concerning Procedures for Handling Cases of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. And in the decision on case Number 10 / KPPU-1/2016, it is known that KPPU decided that PT. Telekomunikasi Indonesia does not provide justice for the parties because of the losses that must be borne by the reported party.

Keywords: Tying agreement, court judgment, loss, legal effort

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN..... vii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

1. Manfaat Teoritis 5

2. Manfaat Praktis..... 5

E. Keaslian Penulisan 7

F. Batasan Konsep..... 12

G. Metode Penelitian..... 13

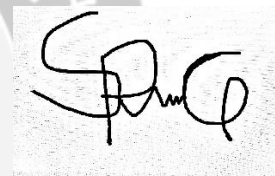
1. Jenis Penelitian	13
2. Bahan Hukum.....	15
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Metode Analisis Sumber Hukum	16
5. Proses Berpikir	17
H. Siatematika Penulisan Hukum/Skripsi	18
BAB II	20
PEMBAHASAN.....	20
A. UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN KARENA <i>TYING AGREEMENT</i>	20
B. PERTIMBANGAN HUKUM <i>TYING AGREEMENT</i> PADA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 10/KPPU-1/2016	33
C. ANALISIS.....	39
BAB III.....	44
PENUTUP.....	44
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Desember 2020

Yang menyatakan,



(Samuel Permana Ginting)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman kegiatan perekonomian juga berkembang dengan pesat, diikuti dengan banyaknya pelaku usaha yang saling bersaing. Persaingan usaha adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis.¹ Setiap pelaku usaha akan saling bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya, baik dengan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan ataupun memberikan harga bersahabat bagi target konsumen yang dituju.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan tidak sehat, Secara umum menjelaskan persaingan usaha adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis, secara independen yang saling berusaha untuk memikat konsumen dengan barang yang dimiliki.²

Undang- undang memberi tiga indikator mengenai telah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu :

1. Dilakukan dengan tidak jujur
2. Melawan hukum

¹ M. Taufik, 2005, *Dinamika Pemasaran Jelajahi Dan Rasakan.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 18

² Akhmad Mujahidin, 2007, *Ekonomi Islam.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 27

3. Dilakukan dengan sengaja untuk menghambat pelaku usaha lain.³

Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan dalam kegiatan ekonomi yang dilarang menurut undang-undang karena dapat merugikan konsumen dan kompetitor lainnya.⁴ UU No 5 Tahun 1999 mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek yang terkait.

Adapun Tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa ekonomi yang berdasarkan pada persaingan usaha, dengan asumsi bahwa melalui persaingan usaha yang sehat, para produsen akan berjuang untuk mencapai kepuasan konsumen melalui produk yang berkualitas, penciptaan harga yang murah dengan penggunaan sumber-sumber produksi yang sekecil mungkin.⁵

Dewasa ini Internet sudah hampir menjadi kebutuhan pokok setiap masyarakat di dunia terkhususnya di Indonesia, terlalu mahal dan kurangnya kualitas internet dari pembelian paket data internet membuat masyarakat mencari layanan internet yang murah dan dapat dipakai dengan baik yang kita ketahui seperti layanan wifi, sehingga masyarakat mencari layanan internet yang kualitas dan harganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

³ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia.*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 17.

⁴ Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 222- 223.

⁵ Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis: Merger dalam Perspektif Monopoli.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 7.

Akan tetapi di dalam penulisan ini ada suatu kendala dimana diduga adanya perjanjian tertutup yang dilakukan oleh salah satu produsen layanan internet.

Kasus yang pernah terjadi pada perjanjian tertutup adalah pada Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-1/2016. Dimana yang perkara adalah pihak terlapor adalah PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk. Dalam putusan tersebut adanya beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan seperti pelanggaran Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 17, Pasal 25 (1) Huruf a dan c dan Pasal 15 (2) yang diteliti oleh penulis. Adapun unsur dugaan pelanggaran adalah ;

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang merupakan setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan bertempat di wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di Indonesia, baik sendiri maupun kelompok dalam menjalankan kegiatan usaha. Bahwa pelaku yang dimaksud adalah PT. Telekomunikasi Tbk.,

2. Perjanjian

Perjanjian dapat dilakukan setidaknya dua pihak atau lebih, dimana dalam kasus perkara ini perjanjian terjadi oleh pihak penerima layanan dan pihak terlapor dan secara tidak langsung juga melibatkan pihak pesaing usaha yang sejenis. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Terlapor dan Pelanggan yang

tertuang dalam kontrak berlangganan, maka telah memenuhi unsur Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

3. Unsur Pihak Lain (pihak yang menerima)

Dimana pengguna layanan disini juga disebut pihak lain.

4. Unsur memuat persyaratan (kewajiban pembelian)

Dimana diketahui dalam laporan menyatakan bahwa pihak terlapor hanya menjual atau menyediakan layanan berpaket saja. Dalam kontrak berlangganan Indihome yang mengatur tentang Pengakhiran Kontrak, disebutkan bahwa pengakhiran kontrak berlangganan Indihome adalah berlaku untuk seluruh layanan Indihome, tidak dapat dilakukan secara parsial/sebagian layanan Indihome. Dalam laporan menyatakan bahwa sebelum nya pihak terlapor menyediakan layanan secara terpisah , akan tetapi seiring berjalan waktu pihak terlapor mewajibkan untuk menggunakan tiga layanan dalam satu paket, sehingga hal tersebut berpotensi untuk menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna layanan.

Akan tetapi dalam putusan KPPU tersebut menyatakan bahwa pihak terlapor tidak bersalah oleh karena itu berdasarkan latar belakang ini saya tertarik untuk mengkaji upaya para pihak yang mengalami kerugian dan pertimbangan hukum terhadap putusan KPPU tersebut dalam perjanjian tertutup/mengikat (*tying agreement*) melalui skripsi yang berjudul “

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN KARENA ADANYA *TYING AGREEMENT* PADA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 10/KPPU-1/2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum bagi pihak yang dirugikan dengan adanya perjanjian *tying agreement*?
2. Apakah pertimbangan hukum yang diputuskan KPPU terhadap perkara Nomor 10/KPPU-1/2016, telah memberikan rasa keadilan terhadap para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap putusan KPPU perkara Nomor 10/KPPU-1/2016, dan untuk mengetahui apakah putusan KPPU tersebut sudah memberikan keadilan terhadap para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya perjanjian tertutup dan

lebih paham bagaimana cara untuk mendapat perlindungan hukum.

Adapun manfaat lainnya ;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan terkhususnya mengenai perlindungan akibat adanya perjanjian tertutup .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah/KPPU, diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk membuat peraturan, atau tindakan agar masyarakat nyaman, dan tidak ada yang dirugikan dengan adanya kasus tersebut untuk memajukan perkembangan, dan keadilan hukum di Indonesia.

- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih mengenal lagi apa itu *tying agreement* dan untuk menjelaskan hak hak yang seharusnya dia dapatkan, dan apa upaya bagi masyarakat apabila merasa dirugikan dengan adanya *tying agreement* tersebut.

- c. Bagi Penulis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai upaya apa yang seharusnya dilakukan akibat adanya persaingan tidak sehat / perjanjian tertutup tersebut, dan manfaat lainya guna untuk menyelesaikan *study S1* penulis.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN KARENA ADANYA *TYING AGREEMENT* PADA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 10/KPPU-1/2016” bukan merupakan plagiat, tetapi merupakan karya asli penulis. Berikut beberapa skripsi dengan tema yang hampir sama ;

1. FATMA DEWI, dari Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- a. Judul Skripsi:

Tinjauan Hukum Terhadap Putusan KPPU Tentang Kartel dan Perjanjian Tertutuo Dalam Distribusi Semen Gresik.

- b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah Putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007 Tentang Kartel jika ditinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999?

- 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam Tentang Putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007 ?

- c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah Putusan KPPU No. 05/KPPU/2007 Tentang Kartel jika ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari Hukum ISLAM mengenai putusan KPPU No. 05/KPPU/2007,

d. Hasil Penelitian

- 1) Dari hasil pembahasan dalam skripsi ini menyimpulkan hasil bahwa No. 05/KPPU/2007 sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999, tetapi tidak secara formil dan filosofi. Selain tidak sesuai secara formil dan filosofi sanksi yang diberikan kepada PT. Semen Gresik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi nilai keadilan.
- 2) Berdasarkan pandangan dari hukum islam Putusan KPPU No. 05/KPPU/2007, telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi dalam Hukum Islam, akan tetapi tidak sesuai dengan nilai dasar ekonomi islam terkhususnya nilai keadilan. Sedangkan, jika ditinjau dari hukum perjanjian Syariah Putusan KPPU No. 05/KPPU/2007, tidak terpenuhi yaitu tujuan akad bertentangan dengan syarat. Oleh karena itu apabila termaksud akal batil maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun,

2. MUHAMMAD AZIZ BADARUDDIN, dari Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Melakukan penelitian skripsi tentang;

a. Judul Skripsi:

Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Tertutup pada Sinergi BUMN (Studi Kasus Putusan KPPU No. 07/KPPU-1/2013).

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan Hukum Persaingan usaha terhadap perjanjian tertutup di Sinergi BUMN?
- 2) Bagaimanakah indikator yang harusnya dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga tidak melanggar ketentuan dari Undang-undang No.5 Tahun 1999?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Tujuan penelitian ini yang pertama adalah agar mengetahui bagaimana pengaturan hukum persaingan usaha mengenai perjanjian tertutup pada Sinergi BUMN.
- 2) Yang kedua adalah agar mengetahui Untuk mengetahui indikator yang harusnya dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga tidak melanggar ketentuan dari Undang-undang No.5 Tahun 1999.

d. Hasil Penelitian :

- 1) Dari pembahasan skripsi maka dapat ditarik hasil yang didapat dalam penelitian adalah dimana Sinergi BUMN merupakan program dari pemerintah yang ditegaskan pada Peraturan Menteri BUMN No.15 Tahun 2012, tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No.05/MBU/2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Sinergi BUMN tidak melanggar aturan hukum persaingan usaha.
- 2) Didapat kesimpulan bahwa BUMN dalam menjalankan kegiatannya, mendapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 3) Pelaku usaha dapat dikatakan melakukan perjanjian tertutup apabila memenuhi beberapa indikator berupa unsur dan kriteria yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

3. Canna Asmara Putri, dari fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.

a. Judul :

UPAYA HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN
AKIBAT *TYING AGREEMENT* DALAM PERSAINGAN
USAHA.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana akibat perjanjian *tying agreement* bagi persaingan usaha dalam Hukum Usaha di Indonesia?
- 2) Bagaimana upaya hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat *tying agreement*?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Mengkaji dan menganalisis Upaya Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat *Tying Agreement* Dalam Persaingan Usaha di Indonesia.
- 2) Mengetahui dan menganalisis akibat hukum *Tying Agreement* Dalam Persaingan Usaha di Indonesia.
- 3) Mengetahui, dan menganalisis hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat *tying agreement*.

d. Hasil Penelitian

- 1) Dapat dijadikan referensi, tambahan ilmu, dan memperdalam perkembangan *tying agreement* dalam persaingan usaha dewasa ini.
- 2) Hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian

lebih lanjut terhadap *tying agreement* dalam persaingan usaha.

- 3) Memberikan masukan dan menambah informasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
- 4) Agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan agar angka persaingan tidak sehat dapat menurun bahwa tidak ada.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul skripsi maka Batasan konsepnya adalah :

1. Tinjauan Yuridis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah mempelajari, memeriksa sebuah pendapat atau pandangan dengan cermat. Adapun menurut Kamus Hukum kata yuridis diambil dari kata *yuridisch* yang memiliki arti menurut hukum atau dari segi hukum. Maka dapat diartikan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁶

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 01 November 2020.

2. Perjanjian, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
3. *Tying agreement*, Bab III Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, *Tying Agreement* adalah bentuk perjanjian distribusi berdasarkan mana distributor diperbolehkan untuk membeli suatu barang tertentu (*tying product*) dengan syarat harus membeli barang lain (*tied product*).
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), KPPU merupakan lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelidiki dan memutuskan dalam perkara, KPPU merupakan badan independen atau disebut *independent self regulatory body* adalah wujud dari produk demokrasi yang dibentuk dalam tatanan Negara Republik Indonesia.⁷
5. Perlindungan hukum, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum merupakan segala usaha untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

⁷ Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha.*, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 16.

6. Upaya Hukum, upaya hukum dalam peradilan di Indonesia ada beberapa perbedaan antara peradilan pidana, dan juga upaya hukum pada putusan KPPU. Dalam peradilan hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak bagi terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan dari hakim yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau dapat upaya hukum terakhir dikatakan peninjauan kembali. Dalam peradilan hukum perdata yang dimaksud dengan upaya hukum adalah tidak jauh berbeda dengan pengertian upaya hukum dalam peradilan pidana akan dalam pengertian upaya hukum pidana yang berhak untuk melakukan upaya hukum adalah para pihak yang bersangkutan dalam acara perdata tersebut. Sedangkan upaya hukum dalam putusan KPPU yang hanya berhak untuk melakukan upaya hukum adalah pihak terlapor saja.

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah yang diangkat oleh penulis, maka metode penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum normatif, adalah prosedur penelitian ilmiah yang menentukan

kebenaran dari logika keilmuan hukum dilihat dari segi normatifnya. Logika keilmuan hukum normatif didasari dari disiplin ilmiah dan cara kerja hukum normatif, yang dimana hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁸ Dalam penelitian skripsi yang menggunakan jenis penelitian normatif dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang – undangan, yang berkaitan dengan judul skripsi. Penelitian hukum normatif berpusat pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan internet.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan penelitian hukum yang diperoleh melalui peraturan Perundang – undangan atau hukum positif, yang terdiri atas :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁸ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, Byumedia Publishing, Malang. hlm. 57.

- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 5) Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha jo. Peraturan Presiden (PP) Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, tanggal 13 Juli 2005.
- 7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, tanggal 6 Januari 2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang didapat dari buku teks, jurnal, pendapat ahli, kasus hukum.⁹ tinjauan yuridis terhadap *tying agreement* pada putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-1/2016 dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.

⁹ Ibid, hlm.392.

- 2) Narasumber didalam penelitian ini adalah pihak yang memahami tentang hukum persaingan usaha, dan untuk menambah pertimbangan penulis untuk menganalisis skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi seperti internet, dan lain-lain.
- b. Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis dalam melakukan wawancara pada objek penelitian. Manfaat dari wawancara adalah untuk menambah data tambahan bukan data utama sebagai pendukung tambahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

4. Metode Analisis Sumber Hukum

Untuk menganalisis sumber hukum penelitian ini dimulai dengan penelusuran bahan-bahan hukum yang sudah

dikumpulkan sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan dalam kasus hukum yang konkrit.¹⁰ Dari seluruh bahan-hukum yang sudah dikumpulkan, maka selanjutnya disistematiskan dan diinterpretasikan untuk dilakukannya analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mempelajari atau menelaah Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditulis oleh penulis.¹¹ Dikatakan bahwa penelitian hukum normatif harus selalu menggunakan pendekatan dari perundang-undangan. Karena, objek yang diteliti adalah berbagai aturan-aturan hukum yang menjadi titik utama penelitian. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Oleh karena itu, hasil dari bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan menjawab permasalahan yang dibahas, yaitu TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN KARENA ADANYA *TYING AGREEMENT* PADA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 10/KPPU-1/2016

¹⁰ Ibid hlm. 299.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*, Kencana, Jakarta. hlm.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir, atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹² Selanjutnya bahan hukum yang dianalisis untuk melihat permasalahan tentang tinjauan yuridis terhadap *tying agreement* pada putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-1/2016 dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.

H. Siatematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelelitian, Dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini Meliputi Upaya Bagi Pihak Yang Merasa Dirugikan Dengan Adanya *Tying Agreement*, Dan Pertimbangan Hukum Yang Diputuskan Oleh KPPU Terhadap Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-1/2016.

¹² Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm.393.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan Dan Saran / Jawaban Atas Rumusan Masalah.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari data yang telah dianalisis maka penulis menyimpulkan bahwa upaya hukum tidak dapat dilakukan oleh pihak terlapor karena telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, yang menyatakan bahwa upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat dilakukan oleh pihak terlapor. Hal tersebut tidak memberikan keadilan kepada para pihak terkhusus kepada pihak ketiga atau pelapor karena apabila keberatan atas putusan KPPU harus lapang dada menerima putusan tersebut walaupun keberatan atas putusan tersebut, karena tidak adanya kesempatan bagi pelapor untuk melakukan upaya hukum.
2. Pertimbangan hukum yang diputuskan KPPU terhadap perkara Nomor 10/KPPU-1/2016, penulis menyimpulkan bahwa putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan terhadap konsumen PT Persero Telekomunikasi Indonesia, penulis beranggapan bahwa dalam putusan KPPU yang menyatakan bahwa secara keseluruhan terlapor tidak bersalah tidak memberikan suatu keadilan bagi para pihak terlebih pihak penerima layanan atau konsumen, karena dalam prakteknya adanya tindakan *tying* yang dilakukan pihak terlapor telah menimbulkan kerugian dari beberapa pihak seperti pihak pelaku usaha lain dan pihak pengguna layanan tersebut.

B. SARAN

1. Sesuai dengan asas keadilan dalam hal upaya hukum seharusnya pemerintah yang berwenang tidak hanya memberikan fasilitas kesalah satu pihak karena tidak semua pihak dapat setuju atas keputusan yang dibuat oleh karena itu sebaiknya mempertimbangkan peraturan yang ada agar terciptanya asas keadilan tersebut.
2. Dalam putusan KPPU diharapkan untuk melihat aspek-aspek yang dirugikan dan unsur-unsur kerugian para pihak akibat adanya perjanjian *tying agreement* agar memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, 2017, *Hukum Kontrak Dan Perencanaan Kontrak.*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Akhmad Mujahidin, 2007, *Ekonomi Islam.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis,Dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antar Teks Dan Konteks.*, ROV Creative Media, Jakarta.
- Arus Akbar Silondae Dan Wirawan B. Ilyas, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis.*, Salemba Empat, Jakarta.
- Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha.*, Permata Aksara, Jakarta.
- Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha/Studi Konsep Pembuktian Terhadap Pejanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha.*, Setara Press, Malang.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis: Merger dalam Perspektif Monopoli.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia.*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, Byumedia Publishing, Malang.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Taufik, 2005, *Dinamika Pemasaran Jelajahi Dan Rasakan.*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia.*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*, Kencana, Jakarta.
- Salim H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian.*, Intermasa, Jakarta.

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, Yrama Widya, Bandung.

Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual.*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh Soedaryo Soimin. Jakarta : Sinar Grafika, 1995, Staatsblad Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha jo. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Tata cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Internet

<http://pengertianaja.blogspot.com/2018/02/pengertian-yuridis-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020, pukul 14.20 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perindungan>, diakses pada tanggal 01 November 2020.

<https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Nomor-5-2011-Pedoman-Ps-15-Perjanjian-Tertutup.pdf> diakses pada tanggal 09 November 2020.

<https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Nomor-5-2011-Pedoman-Ps-15-Perjanjian-Tertutup.pdf> diakses pada tanggal 23 November 2020.

